



Tuntut Dialog Dengan Pemda DIY

■ Pedagang Teras Malioboro 2 Unjuk Rasa di Kepatihan

YOGYA, TRIBUN - Polemik relokasi pedagang Teras Malioboro 2 (TM2) kembali bergulir. Pada Rabu (11/9), ratusan pedagang TM 2 kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan.

Mereka mendesak Pemda DIY segera membuka ruang dialog. Dalam aksi kali ini, para pedagang turut membawa berbagai macam spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka, serta keranda sebagai simbol matinya usaha mereka akibat relokasi.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati mengungkapkan kekecewaannya karena upaya pihaknya untuk berdialog dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) selalu menemui jalan buntu.

Supriyati menjelaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan surat permohonan dialog kepada Pemda DIY. Namun, surat-surat tersebut selalu ditolak dan dilimpahkan ke Pemerintah Kota Yogyakarta.

"(Kebijakan) Sumbu filosofi itu kan dari Pemda DIY, tapi kok kalau kita mau dialog malah disuruh ke Kota (Pemkot Yogya). Ini kan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik," ujar Supriyati.

Para pedagang TM2 merasa kecewa dengan sikap Pemda

DIY yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi mereka. Mereka menilai bahwa relokasi telah berdampak buruk pada perekonomian mereka dan meminta pemerintah untuk memberikan solusi yang adil.

Ditambahkannya, para pedagang juga sudah berupaya menyurat Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY. Namun menurutnya yang didapat pedagang hanya janji palsu.

"Kemarin kami coba inisiatif coba audiensi, berikirim surat ke Dinas Kebudayaan DIY, waktu itu katanya akan ada pertemuan tapi nyatanya langsung digagalkan. Makanya kami kembali ke sini, bersurat sampai dua kali dan ditolak lagi," jelasnya.

Ia menegaskan, tuntutan yang disampaikan para pedagang masih sama, yakni meminta dilibatkan dalam proses relokasi. Para pedagang pun menilai, relokasi tahap 2 ini (di Beskalan dan Ketandan) tidak mengatasi masalah yang dialami para pedagang, yakni omzet yang menurun.

"Kami juga heran sampai ada perencanaan gambaran tapi dari situ saja kita tidak pernah dilibatkan, jadi kami ingin ada pelibatan kami sebagai pedagang *wong* kita yang dipindahkan tapi nggak pernah diajak urun rembug seperti itu," paparnya.

"Berharap bertahan (di

TIDAK RESPONSIF

- Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 kembali unjuk rasa di depan Kantor Gubernur DIY, Rabu (11/9).
- Mereka mendesak Pemda DIY segera membuka ruang dialog terkait relokasi di Beskalan dan Ketandan
- Pedagang TM2 kecewa dengan sikap Pemda DIY yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi mereka.

TM2) karena kami sudah dua tahun beradaptasi di situ waktu audiensi di DPRD DIY juga dari dinas PU menyampaikan di situ ada gerai UMKM, kenapa ada gerai UMKM tapi kita disingkirkan dari TM 2," katanya.

Menurut Supriyati lokasi yang tepat untuk para pedagang adalah kembali ke selasar Malioboro. "Ya namanya PKL Malioboro tempat ideal ya di selasar Malioboro, bahwa kita sebenarnya PKL Malioboro adalah ikonnya Malioboro," ucap dia.

Respons sultan

Terkait tuntutan para pedagang yang mengancam kembali ke selasar Malioboro jika sejumlah tuntutan tidak diindahkan oleh Pemkot Yogya maupun Pemda DIY, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut buka suara.

"(Kembali berjualan ke selasar) *Yo nggak*. Ya terserah dia, *selasar duku duwe de'e kok* (selasar bukan punya mereka)," kata Sultan, Rabu (11/9). Sekadar informasi, Peme-

rintah Kota Yogya dan Pemda DIY saat ini sedang mempersiapkan relokasi tahap kedua bagi para pedagang Teras Malioboro. Rencananya, para pedagang akan dipindahkan ke kawasan Ketandan dan Beskalan, Kota Yogyakarta.

Lokasi baru ini dirancang untuk menampung seluruh 1.041 pedagang Teras Malioboro 2. Secara rinci, 712 pedagang akan ditempatkan di Teras Malioboro Ketandan yang memiliki luas lahan 3.779 meter persegi.

Sementara itu, 329 pedagang lainnya akan berjualan di Teras Malioboro Beskalan dengan luas lahan 2.982 meter persegi. Kedua bangunan baru ini akan didesain dengan tiga lantai. Setiap pedagang akan mendapatkan tempat berjualan dengan ukuran 70 sentimeter x 1,2 meter.

Konsep relokasi ini telah disiapkan secara matang oleh tim kerja di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X. "(Slapkan relokasi) Iya," pungkaskanya. **(han/kpe)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005